

Pengenalan Pendidikan Islam Dan Kebijakan Politik Pendidikan

Munawaroh¹, Shofwatun Hilwa², Abdusima Nasution³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam , Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 5, 2026

Revised Juni 6, 2026

Accepted Juni 14, 2026

Kata Kunci:

Pendidikan Islam,
Kebijakan,
Politik Pendidikan

Keywords:

*Islamic Education,
Policy,
Political Education.*

ABSTRAK

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah upaya membina manusia berlandaskan ajaran Islam agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai instrumen pengaturan dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Tulisan ini bermaksud menguraikan konsep dasar pendidikan Islam serta keterkaitan dan dampak kebijakan politik pendidikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sejumlah literatur yang relevan. Temuan kajian memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membangun karakter dan moral peserta didik, sementara kebijakan politik pendidikan berperan sebagai alat yang menentukan arah, sasaran, dan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Kebijakan yang tepat sasaran akan mendorong peningkatan mutu pendidikan Islam, sebaliknya kebijakan yang kurang tepat justru dapat menghambat kemajuannya. Karena itu, nilai-nilai pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional saling membutuhkan satu sama lain demi terwujudnya sistem pendidikan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti perkembangan zaman.

ABSTRACT

Islamic education is essentially an effort to nurture individuals based on Islamic teachings so that they grow into individuals with faith, knowledge, and noble morals. In practice, the implementation of Islamic education cannot be separated from the political education policies formulated by the government as an instrument for regulating and developing the national education system. This paper aims to outline the basic concepts of Islamic education and the relationship and impact of political education policies on the development of Islamic education in Indonesia. The study was conducted through a literature review, reviewing a number of relevant sources. The findings demonstrate that Islamic education plays a crucial role in building the character and morals of students, while political education policies serve as a tool that determines the direction, goals, and governance of Islamic educational institutions. Well-targeted policies will encourage improvements in the quality of Islamic education, while inappropriate policies can actually hinder its progress. Therefore, the values of Islamic education and national education policies are mutually dependent on each other to create an education system that meets the needs of society while keeping pace with current developments.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Munawaroh
Program Studi Pendidikan Agama Islam , Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary,
Padangsidempuan, Indonesia
Email: munawarohuna2002@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sebuah bangsa karena melalui pendidikan, manusia dapat mengasah potensi yang ada di dalam dirinya, baik dari aspek intelektual, moral, maupun spiritual. Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai jembatan untuk mewariskan ilmu, nilai, dan budaya antar generasi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam pun mengalami banyak perubahan. Lembaga seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam terus bertumbuh dan memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan masyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga membekali peserta didik dengan ilmu umum yang dibutuhkan dalam kehidupan modern, sehingga pendidikan Islam memegang peran strategis dalam mencetak generasi yang seimbang antara wawasan keagamaan dan keilmuan umum.

Perkembangan pendidikan Islam tersebut tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik pendidikan yang dijalankan pemerintah. Politik pendidikan dapat dipahami sebagai strategi atau kebijakan pemerintah dalam mengatur sistem pendidikan agar berjalan terarah, tersusun rapi, dan sejalan dengan cita-cita nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan arah, sasaran, serta pola pengelolaan pendidikan di suatu negara.

Kebijakan politik pendidikan memberikan dampak besar terhadap kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan Islam. Pemerintah berperan dalam memberikan aturan, dukungan, serta pengakuan kepada lembaga pendidikan Islam agar mampu berkembang dan ikut berkontribusi dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, memahami konsep pendidikan Islam berikut kebijakan politik pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk mengetahui keterkaitan antara dunia pendidikan Islam dan kebijakan negara dalam mengelola sistem pendidikan.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa pendidikan Islam dan kebijakan politik pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat. Arah, perkembangan, dan kelangsungan lembaga pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pendidikan yang diberlakukan pemerintah. Oleh sebab itu, pemahaman terkait pendidikan Islam dan politik pendidikan penting untuk dipelajari, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam dan memperkuat kontribusinya bagi sistem pendidikan nasional.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan secara mendasar berkaitan dengan kondisi dan dinamika politik suatu bangsa, yang juga dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial yang berupaya mengendalikan otoritas pemerintahan. Kajian politik pendidikan umumnya berpusat pada peran negara dalam sektor pendidikan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asumsi dan tujuan di balik berbagai strategi transformasi pendidikan dalam masyarakat. Analisis semacam ini dapat mengungkap relasi antara kepentingan politik suatu bangsa dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan [1].

Pembahasan mengenai konsep pendidikan Islam dan kebijakan politik pendidikan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pendidikan Islam tumbuh di tengah kerangka kebijakan negara, sekaligus memberi gambaran pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan kompetitif.

2. METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai dasar utama pengumpulan data. Sumber-sumber tertulis yang digunakan meliputi buku referensi, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendidikan Islam dan kebijakan politik pendidikan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep, pemikiran para ahli, serta kebijakan politik di bidang pendidikan Islam secara komprehensif dan tersistematis. Tahapan analisis meliputi seleksi dan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan menelaah dan membandingkan berbagai referensi yang menjadi rujukan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dasar Pendidikan Islam

Secara terminologi, terdapat beragam definisi pendidikan Islam yang dikemukakan para ahli sesuai sudut pandang masing-masing. Al-Abrasyi, sebagaimana dikutip Ramayulis, memaknai tarbiyah sebagai upaya mempersiapkan manusia agar dapat hidup secara sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sehat secara jasmani, memiliki akhlak yang baik, berpikir teratur, berperasaan halus, terampil dalam bekerja, serta santun dalam bertutur kata baik lisan maupun tulisan. Pandangan Al-Abrasyi lebih menitikberatkan pendidikan pada pencapaian kesempurnaan dan kebahagiaan hidup [2].

Sementara itu, Ahmad Supardi memandang pendidikan Islam sebagai kerangka pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan tuntunan iman Islam, yang bertujuan membina dan membentuk individu yang taat kepada Allah, mencintai orang tua serta sesama manusia, dan menunjukkan pengabdian terhadap tanah air sebagai bentuk nikmat yang dianugerahkan Allah Swt.

Pendidikan Islam merupakan suatu proses perubahan yang berupaya membentuk perilaku individu, baik dalam kehidupan pribadi, lingkup sosial, maupun lingkungan sekitarnya, terutama lewat upaya pedagogis yang dipandang sebagai panggilan profesi dan kegiatan mendasar dalam masyarakat. Pendidikan Islam berfungsi membangun identitas keislaman serta mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sejalan dengan ajaran Islam. Secara umum, pendidikan Islam merupakan pendekatan pendidikan yang menyeluruh, berorientasi pada pembentukan pribadi Muslim yang kaffah sekaligus mengembangkan seluruh potensi manusia, baik dimensi jasmani maupun ruhani [3].

Berbagai pendapat di atas pada intinya memiliki kesamaan pandangan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia yang berlandaskan ajaran Islam, dengan tujuan membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, serta mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmani maupun ruhani agar tercipta kehidupan yang baik dan bahagia.

Pada dasarnya, pendidikan Islam merupakan usaha manusia yang bertujuan membentuk manusia secara utuh, baik dari sisi jasmani maupun ruhani. Pandangan ini selaras dengan cara Islam memandang manusia sebagai makhluk yang menyatu dan tidak terpisah-pisah. Karena itu, tujuan ajaran Islam pada hakikatnya sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yakni mewujudkan insan kamil-sosok manusia yang sehat jasmaninya, baik akal dan ruhaninya sehingga berakhlak mulia, serta memiliki ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. Bekal tersebut memungkinkan manusia memanfaatkan berbagai peluang yang Allah sediakan di muka bumi untuk kemaslahatan diri sendiri maupun bersama.

Sejak awal masuknya ke Indonesia, pendidikan Islam telah membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Mulai dari bentuk sederhana seperti langgar, surau, masjid, dan pesantren, hingga sistem klasikal seperti madrasah, semuanya merupakan wujud sarana pendidikan Islam di Indonesia yang terus

mengalami perkembangan dan perubahan kebijakan sesuai dengan pemerintahan yang membawahnya [4].

Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan politik pendidikan yang diterapkan pemerintah pada setiap masanya. Berbagai kebijakan yang diterbitkan turut memengaruhi arah, sistem, dan pengelolaan pendidikan Islam, baik melalui pengakuan kelembagaan, pengaturan kurikulum, maupun pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, dinamika pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi tidak hanya oleh kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh kebijakan politik pendidikan yang berlaku pada setiap era pemerintahan.

3.2 Politik Pendidikan Islam

Kata politik berasal dari bahasa Arab *siyasyah*, yang kemudian berkembang menjadi kata “*siasat*” atau “*politik*” dalam bahasa Inggris [5]. Istilah ini juga berakar dari kata Latin *politicus* dan Yunani *politikos*, yang sama-sama merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, serta dari kata *polis* yang bermakna kota. Dalam khazanah bahasa Indonesia, istilah politik kemudian mencakup segala urusan dan tindakan—seperti kebijakan dan peraturan—yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara maupun hubungan antarnegara, dan terkadang juga membawa konotasi negatif berupa tipu daya atau kelecikan. Selain itu, istilah ini juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, yaitu ilmu politik [6].

Politik pendidikan merupakan bidang kajian interdisipliner yang memadukan ilmu politik dengan ilmu pendidikan, dengan tujuan menjelaskan hubungan yang kompleks antara berbagai fenomena politik dan persoalan pendidikan. Inti dari kajian politik pendidikan adalah mengungkap kaitan antara proses perumusan tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapainya. Kajian politik pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan Islam, sebaiknya dimulai dengan memahami periodisasi sejarah perjalanan suatu bangsa, karena politik pendidikan kerap dipandang sebagai bagian dari kepentingan lokal sekaligus sarana memperkuat identitas budaya suatu negara [7].

Dalam konteks pendidikan, politik memegang peran yang signifikan, bukan sekadar unsur tambahan. Sampai saat ini, banyak pihak masih beranggapan bahwa kemajuan suatu negara ditentukan terutama oleh sektor ekonomi dan politik, sebagaimana tercermin dari arah kebijakan yang lebih banyak berfokus pada kedua bidang tersebut. Hampir tidak ada politisi yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam agenda politiknya. Hal ini terjadi baik dalam konteks nasional maupun internasional, di mana perhatian lebih banyak tercurah pada pembangunan ekonomi, pertahanan-keamanan, dan hubungan luar negeri, sementara sektor pendidikan belum mendapat porsi prioritas yang memadai.

Politik pendidikan Islam membahas bagaimana kekuasaan, kebijakan, ideologi, dan kepentingan politik memengaruhi sistem pendidikan Islam, baik dari sisi kurikulum, kelembagaan, tujuan, maupun pengelolaannya. Bidang ini umumnya berada pada ranah pendidikan Islam, ilmu politik, dan kebijakan pendidikan.

Secara sederhana, politik pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan nilai, kelembagaan, dan kepentingan umat Islam, yang mencakup siapa yang mengelola pendidikan Islam, bagaimana kebijakannya disusun, kepentingan apa yang memengaruhi sistemnya, serta bagaimana pendidikan Islam dapat membentuk masyarakat.

Politik pendidikan Islam berkaitan dengan beragam kebijakan, program, dan inisiatif yang dijalankan oleh lembaga pemerintah maupun pendidikan untuk membina, memajukan, dan mengatur pendidikan Islam. Cakupannya dapat mencakup berbagai dimensi, antara lain pengembangan

kurikulum, dukungan pendanaan, profesionalisasi guru, dan regulasi kelembagaan. Beberapa aspek yang relevan dalam politik pendidikan Islam meliputi hal-hal berikut:

1. Kurikulum

Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki kewenangan menentukan isi kurikulum pendidikan Islam, mencakup materi ajar, buku teks, dan metode pengajaran. Kurikulum tersebut dapat memuat pembelajaran Al-Quran, Hadis, sejarah Islam, etika, dan prinsip-prinsip keislaman.

2. Pendidikan Agama Islam

Beberapa negara menetapkan kerangka pendidikan agama agar siswa dapat memperoleh pengetahuan keislaman, baik melalui pengajaran agama di sekolah umum maupun di lembaga keagamaan khusus.

3. Regulasi Institusi Pendidikan Islam

Negara dapat menetapkan aturan bagi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, asrama, dan sekolah agama, termasuk standar akademik, aspek keamanan, dan prosedur perizinan.

4. Pendanaann

Pemerintah dapat menyalurkan dana bagi lembaga atau program pendidikan Islam, terutama bila dipandang penting bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan nasional.

5. Pengembangan Tenaga Pendidik

Pelatihan profesional dan pengembangan pendidik dalam pendidikan Islam menjadi isu penting dalam politik pendidikan. Berbagai program diadakan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dalam menyampaikan pengetahuan keislaman [8].

Berbagai aspek di atas memperlihatkan bahwa politik dalam pendidikan Islam berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam di suatu negara. Lewat kebijakan kurikulum, pengelolaan pendidikan agama, regulasi kelembagaan, dukungan pendanaan, serta pembinaan tenaga pendidik, pemerintah memiliki andil besar dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang terstruktur dan bermutu. Pengelolaan yang baik atas kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong terbentuknya pendidikan Islam yang tidak hanya menanamkan nilai keagamaan, tetapi juga mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dan negara.

3.3 Hubungan antara Pendidikan Islam dengan Kebijakan Politik

Pendidikan Islam dan kebijakan politik erat kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Islam berperan dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat, sedangkan kebijakan politik berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem pendidikan.

Pada praktiknya, kebijakan politik pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti pengakuan lembaga pendidikan Islam, pengaturan kurikulum, serta pendanaan pendidikan. Oleh karena itu, arah perkembangan pendidikan Islam sering kali bergantung pada kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah [9].

Dalam sejarah Indonesia, pendidikan Islam telah mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi politik. Pada masa kolonial, pendidikan Islam sering mengalami pembatasan karena dianggap dapat menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Namun setelah Indonesia

merdeka, pemerintah mulai memberikan pengakuan dan dukungan terhadap pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan pendidikan nasional [10].

Selain itu, pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran sosial dan politik masyarakat. Melalui pendidikan Islam, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang baik dapat ditanamkan kepada peserta didik. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membangun kehidupan politik yang sehat dan bermoral. Dengan demikian, relasi antara pendidikan Islam dan kebijakan politik bersifat dua arah. Kebijakan politik dapat menentukan arah perkembangan pendidikan Islam, sementara pendidikan Islam turut membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran moral serta tanggung jawab dalam kehidupan politik [11].

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, hubungan ini dapat dilihat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

1. Pendidikan sebagai Alat Politik

Salah satu bentuk hubungan antara pendidikan Islam dan kebijakan politik adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik negara. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai yang dianggap penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, pendidikan digunakan untuk membentuk karakter warga negara yang religius sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah mewajibkan adanya pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan, baik di sekolah umum maupun di lembaga pendidikan Islam.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam membentuk moral, etika, serta spiritualitas peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter masyarakat sesuai dengan tujuan negara [12].

Pendidikan Islam digunakan negara sebagai cara untuk membentuk karakter masyarakat agar memiliki nilai moral dan religius sesuai Pancasila. Dengan mewajibkan pendidikan agama di semua sekolah, pemerintah tidak hanya mencerdaskan otak siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan yang sejalan dengan cita-cita negara.

2. Legitimasi Hukum dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Salah satu contoh penting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kelembagaan, melalui regulasi ini, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren secara formal diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menghapus dikotomi pendidikan di masa lalu dengan memberikan kedudukan yang setara antara lembaga pendidikan Islam dengan sekolah umum. Fondasi pengembangan Pendidikan yaitu legitimasi hukum ini memberikan dasar yang sangat kuat bagi lembaga pendidikan Islam untuk terus berkembang. Dengan payung hukum yang jelas, madrasah dan pesantren memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mengakses dukungan negara, baik dari segi pembinaan, bantuan sarana prasarana, hingga pengembangan mutu pendidikan [13]. Undang-undang ini merupakan hasil dari proses politik yang panjang dan menjadi dasar hukum bagi pengakuan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Melalui undang-undang tersebut, pendidikan agama diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Selain itu, lembaga pendidikan Islam mendapatkan kedudukan yang setara dengan sekolah umum. Dengan adanya legitimasi hukum ini, pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa [14].

Legitimasi hukum melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan titik balik yang menyetarakan posisi pendidikan Islam dalam sistem nasional. Pengakuan ini bukan sekadar formalitas,

melainkan fondasi utama yang memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk mendapatkan akses dukungan negara dan berkembang sejajar dengan sekolah umum.

3. Integrasi Nasional dalam Sistem Pendidikan

Kebijakan politik pendidikan juga berfungsi untuk menciptakan integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi ini bertujuan untuk menyatukan sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara keduanya.

Melalui berbagai kebijakan pendidikan, pemerintah berusaha mengintegrasikan kurikulum pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Misalnya dengan memasukkan mata pelajaran agama dalam kurikulum sekolah umum serta memberikan pengakuan terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Integrasi ini penting untuk menjaga kesatuan sistem pendidikan di Indonesia sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap menjadi bagian dari proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak berjalan secara terpisah, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun masyarakat yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia [15].

Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar penyatuan administratif, melainkan langkah strategis untuk menciptakan kesetaraan. Upaya ini memastikan bahwa pendidikan Islam menjadi bagian integral yang berkontribusi langsung pada pembangunan karakter bangsa yang religius dan berakhlak mulia. Sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan sistem pendidikan nasional inilah yang kemudian menuntut peran aktif pemerintah untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar integrasi tersebut berjalan secara optimal.

3.4 Peran Pemerintah dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan perkembangan pendidikan Islam dalam suatu negara. Sebagai pemegang kekuasaan politik, pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan nasional karena keduanya saling berkaitan dalam upaya membangun sistem pendidikan yang terpadu.

Pendidikan Islam di Indonesia berkembang tidak hanya melalui inisiatif masyarakat, tetapi juga melalui dukungan kebijakan pemerintah yang memberikan pengakuan, regulasi, serta fasilitas bagi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pendidikan Islam dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

1. Peran Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan Pendidikan

Salah satu peran utama pemerintah dalam pendidikan Islam adalah sebagai pembuat kebijakan (policy maker). Pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam.

Dengan adanya kebijakan yang jelas, penyelenggaraan pendidikan Islam dapat berjalan secara lebih terarah dan terstruktur sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi intelektual dan spiritual yang seimbang.

Kebijakan pemerintah juga bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pembaruan dalam sistem pendidikan agar mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [16].

Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai arsitek yang menentukan masa depan pendidikan Islam. Kebijakan yang inovatif dan

adaptif menjadi kunci utama agar pendidikan Islam tetap mampu bersaing dan relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap kokoh menjaga identitas keislamannya.

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Fasilitator Pendidikan Islam

Peran ini terlihat dari berbagai regulasi yang mengatur keberadaan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan pengakuan resmi terhadap lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Pengakuan ini penting agar lembaga pendidikan Islam memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem pendidikan nasional serta dapat memperoleh dukungan dari pemerintah.

Regulasi tersebut memberikan pengakuan resmi terhadap lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan adanya pengakuan tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat memperoleh dukungan dalam bentuk fasilitas, pembinaan, serta program peningkatan mutu pendidikan [17].

Selain sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan Islam. Dukungan tersebut diberikan agar lembaga pendidikan Islam dapat berkembang secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.

Peran fasilitator pemerintah dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberian bantuan dana pendidikan, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana madrasah dan pesantren, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pengembangan kurikulum pendidikan Islam [18].

Selain itu, pemerintah juga memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap pesantren melalui kebijakan pendidikan nasional, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat [19].

Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin eksistensi dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan fasilitas yang berkelanjutan, lembaga pendidikan Islam mampu memperkuat posisi tawar dan meningkatkan standar mutu pendidikan, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

3. Peran Pemerintah dalam Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Islam

Pemerintah juga memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik (sertifikasi dan PPG), pengembangan kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan Islam. Pendidikan dipandang sebagai investasi penting bagi masa depan bangsa karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan [20].

Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan adalah memastikan bahwa pendidikan Islam tidak stagnan, melainkan terus bertumbuh secara kualitas. Melalui peningkatan mutu pendidik dan kurikulum yang inovatif, pemerintah menjadikan pendidikan Islam sebagai investasi strategis untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga kompetitif di era modern.

4. Peran Pemerintah dalam Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

Melalui kebijakan pendidikan nasional, pemerintah memberikan pengakuan terhadap madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya sebagai bagian dari sistem pendidikan formal. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pendidikan agama di sekolah sebagai upaya untuk membentuk karakter peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia [21]. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki

posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional dan menjadi bagian dari upaya negara dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan [22].

Peran pemerintah dalam mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional adalah langkah strategis untuk meminimalisir dikotomi pendidikan. Dengan menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian formal dari sistem nasional, pemerintah berhasil memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan menyatu dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa, sehingga pendidikan Islam mampu berkontribusi maksimal bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan kerangka pendidikan yang secara fundamental berakar pada doktrin Islam sebagaimana diartikulasikan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan pendidikan Islam melampaui sekadar transmisi pengetahuan; ia juga berusaha untuk menumbuhkan individu-individu yang dicirikan oleh iman, kesalehan, dan perilaku berbudi luhur. Akibatnya, prinsip dasar pendidikan Islam menggarisbawahi perlunya pengembangan yang harmonis dari dimensi kognitif, spiritual, etika, dan sosial pelajar, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi tugas mereka sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi.

Selanjutnya, politik pendidikan Islam berkaitan dengan berbagai kebijakan, strategi, serta keputusan pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Politik pendidikan berperan penting dalam menentukan arah, tujuan, serta regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam. Melalui kebijakan negara seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam memperoleh pengakuan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk berkembang.

Hubungan antara pendidikan Islam dan kebijakan politik pendidikan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Pendidikan Islam membutuhkan dukungan kebijakan politik agar dapat berkembang secara optimal, sementara kebijakan politik pendidikan juga memerlukan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai dasar pembentukan karakter bangsa. Dengan adanya kebijakan yang tepat, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren dapat berkembang, meningkatkan kualitas pendidikan, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

REFERENSI

- [1] Ahmad Ridwan, Muhammad Ikbal, and Muhammad Zak Rahman, "Peran Politik Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 3 (2023): 918. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.279>.
- [2] kasman, "Pengertian Pendidikan Islam Secara Istilah (Terminologi)," *Pendais*, Vol. 5, No. 1 (2023): 73.
- [3] Rasyidi, Sukar No, And Minna El Widdah, "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Literasiologi*, Vol. 6, No. 2 (2021): 76.
- [4] Nailil Maghfiroh, Atik Dwi Lestari, and Fatchurrohman, "Politik Pendidikan Islam Di Indonesia," *Citra Ilmu*, Vol. XVIII (2022): 23.
- [5] Intan Permata Sari and Ahmad Burhanuddin, "Analisis Kebijakan Politik Pendidikan Islam Dalam," *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, Vol. 1, No. 3 (2024): 330. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/AhsaniTaqwim>.
- [6] Rahmad S, Zulmuqim, and Muhammad Zalnur, "Politik Pendidikan Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia," *Kaisa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1 (2023): 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/kaisa.v3i1.563>.
- [7] Ihsan Harun, "Pondok Pesantren Modern: Politik Pendidikan Islam Dan Problematika Identitas Muslim," *Jurnal As-Salam*, Vol. 2, No. 1 (2018): 55.

- [8] Surya Bakti, Salminawati, and Usiono, "Pondok Pesantren Modern : Politik Pendidikan Islam Dan Problematika Identitas Muslim," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 6 (2023): 2906. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.6052> Copyright.
- [9] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 175.
- [10] Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 156.
- [11] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 52.
- [12] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 178
- [13] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal tentang pendidikan keagamaan yang menegaskan bahwa madrasah dan pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
- [14] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 98.
- [15] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 63.
- [16] Saiful Anwar dan Marlina, "Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia," *Al-I'tibar*, hlm. 45.
- [17] M. Shabir U., "Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia," *Lentera Pendidikan*, hlm. 205
- [18] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012).
- [19] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- [20] Ahmad Ridwan dkk., "Peran Politik Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas SDM," *Journal of Education Research*, hlm. 214.
- [21] Dedi Supriadi dkk., "Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional," *Edukasi Islami*, hlm. 18.
- [22] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 42.